

PENGARUH EFEKTIVITAS SOSIALISASI PERPAJAKAN DAN EFEKTIVITAS PENDAPATAN ASLI DAERAH TERHADAP PERTUMBUHAN EKONOMI DI KABUPATEN LAMONGAN

Diani Anggita Febrianti¹, Rida Perwita Sari²

Program Studi Akuntansi
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Surabaya, Indonesia

e-mail: dianianggita16@gmail.com , ridaps.ak@upnjatim.ac.id

Abstrak

Penelitian ini dilakukan bertujuan untuk mengetahui pengaruh efektivitas sosialisasi perpajakan dan efektivitas Pendapatan Asli Daerah terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Penelitian ini termasuk kuantitatif dengan menggunakan data sekunder yaitu data yang telah disajikan oleh Bapenda Lamongan, BPKAD Lamongan, dan BPS Kabupaten Lamongan periode tahun 2017-2021. Sampel dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*, dengan kriteria pemilihan data sosialisasi perpajakan, data Pendapatan Asli Daerah, dan data pertumbuhan ekonomi. Alat analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah WarpPLS 7.0. Penelitian ini memperoleh hasil yang menyatakan bahwa (1) efektivitas sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya meskipun sosialisasi perpajakan telah dilakukan dengan baik, tetapi tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan. (2) Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya apabila penerimaan Pendapatan Asli Daerah meningkat, maka akan diikuti dengan peningkatan pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan. Dan apabila penerimaan Pendapatan Asli Daerah menurun, maka akan diikuti dengan penurunan pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan.

Kata kunci: Sosialisasi Perpajakan, Pendapatan Asli Daerah, Pertumbuhan Ekonomi

Abstract

This research was conducted aiming to determine the effect of the effectiveness of tax socialization and the effectiveness of Regional Original Income on economic growth in the Lamongan District Government. This research includes quantitative by using secondary data, namely data that has been presented by Bapenda Lamongan, BPKAD Lamongan, and BPS Lamongan Regency for the 2017-2021 period. The sample in this study was purposive sampling, with the criteria for selecting tax socialization data, regional original income data, and economic growth data. The analytical tool used in this research is WarpPLS 7.0. This study obtained results which stated that (1) the effectiveness of tax socialization has no effect on economic growth, this means that even though tax socialization has been carried out well, it doesn't affect the economic growth of Lamongan Regency. (2) The effectiveness of Regional Original Income had an effect on economic growth, this means that if the receipt of local revenue increases, it will be followed by an increase in the economic growth of Lamongan Regency and if the receipt of regional original income decreases, it will be followed by a decrease in the economic growth of Lamongan Regency.

Keywords : *Effectiveness, Tax Socialization, Regional Original Revenue, Economic Growth*

PENDAHULUAN

Indonesia yang merupakan Negara Kesatuan Republik Indonesia dimana memiliki 34 provinsi dan di setiap provinsi tersebut terbagi menjadi daerah-daerah kabupaten/kota. Pembentukan pemerintah daerah memiliki tujuan agar pengkoordinasian pemerintah pusat terhadap setiap daerah (provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, dan desa) lebih mudah dan terorganisir. Karena luasnya negara Indonesia membuat pemerintah pusat kesulitan dalam mengalokasikan sumber daya secara merata, seperti masalah ketimpangan dimana tidak meratanya tingkat pertumbuhan ekonomi pada masing-masing daerah. Tingkat pertumbuhan ekonomi di setiap daerah merupakan indikasi bahwa suatu daerah telah berhasil melaksanakan pembangunan ekonomi di kehidupan masyarakat (Walintukan et al., 2019).

Pemerintah Indonesia dalam menciptakan kesejahteraan masyarakat berkeinginan untuk meminimalkan ketimpangan antara pusat dengan daerah dengan menerapkan asas desentralisasi dalam pelaksanaan otonomi daerah. Penerapan sistem tersebut membuat pemda lebih banyak berpartisipasi untuk menjalankan dan mengatur masing-masing daerahnya. Karena pemerintah daerah merupakan pemegang administrator secara penuh dalam pengelolaan daerahnya, maka harus dengan bertindak dengan maksimal agar daerahnya bisa terfokus dalam meraih tujuan dan sasaran yang ditetapkan (Watulingas et al., 2018).

Salah satu indikator keberhasilan dalam melaksanakan otonomi daerah adalah adanya peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah. Peningkatan pertumbuhan tersebut harus didukung disertai langkah pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi-potensi pada sumber pendapatannya. Apabila pemerintah daerah berhasil dalam mengelola potensi sumber pendapatan

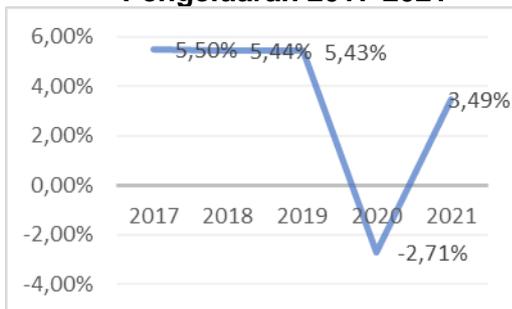
daerahnya, maka PAD akan bertambah dan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah akan mengalami peningkatan pula. Peran penerimaan pajak daerah berkaitan erat dengan Penerimaan Asli Daerah (PAD). Maka dari itu, pemerintah daerah sebagai pemegang administrator secara penuh harus mampu untuk terus mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Namun, seringkali pemerintah menghadapi kendala dalam upaya mengoptimalkan penerimaan pajak daerah seperti rendahnya kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban membayar pajaknya yang berakibat pada rendahnya pendapatan sektor pajak daerah yang akan berpengaruh pada potensi PAD.

Penelitian yang dilakukan oleh Rendy (2022), sosialisasi perpajakan memiliki tujuan untuk memupuk rasa kesadaran masyarakat dalam membayar kewajibannya yaitu pajak sehingga PAD (Pendapatan Asli Daerah) terutamanya pajak daerah akan meningkat. Apabila pemerintah daerah gencar untuk melakukan sosialisasi, maka akan menumbuhkan rasa kesadaran masyarakat untuk membayar pajak daerah, sehingga PAD akan naik yang berarti membantu pemda untuk memulihkan tingkat pertumbuhan ekonomi daerah.

Dikutip pada laman Bappelitbangda (2022) pertumbuhan ekonomi Kabupaten Lamongan pada tahun 2016-2020 memiliki pertumbuhan yang cukup lambat. Di tahun 2020 pertumbuhan ekonomi menurun dikarenakan faktor adanya pandemi Covid-19. Hal tersebut memberikan dampak pada melemahnya ekonomi di internasional, nasional, dan regional sehingga memberikan pengaruh pada perekonomian di Kabupaten Lamongan. Berikut ini merupakan laju PDRB Atas Dasar Harga Konstan Pendekatan Pengeluaran di Kabupaten Lamongan pada tahun 2017-2021, yaitu:

Gambar 1. 1.

Laju Pertumbuhan PDRB ADHK Kabupaten Lamongan Menurut Pengeluaran 2017-2021



Sumber: BPS Kabupate Lamongan, (2023)

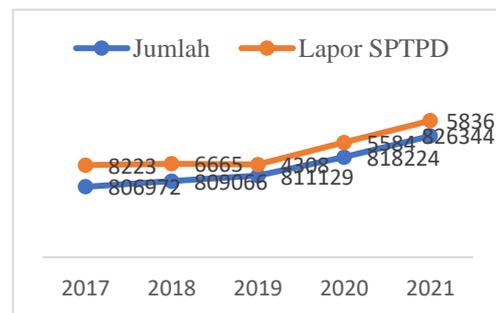
Pada tahun 2017 sampai 2020 laju pertumbuhan berturut-turut menurun hingga mencapai minus, kemudian pada tahun 2021 laju pertumbuhan kembali naik. Penurunan yang signifikan tersebut dikarenakan munculnya wabah Covid-19 yang menyebabkan melemahnya ekonomi di Kabupaten Lamongan. Menurut Nurcholidah et al. (2018) bahwa semakin tinggi penerimaan PAD di suatu daerah maka diikuti dengan kenaikan pertumbuhan ekonominya. Jadi dapat disimpulkan bahwa, apabila tingkat pertumbuhan ekonominya rendah akan berdampak pada penerimaan PAD yang menurun juga. Dengan tingkat pertumbuhan PAD yang semakin baik menyebabkan kenaikan pada pertumbuhan ekonomi daerah tersebut.

Tingkat kemandirian fiskal suatu daerah dapat dikatakan baik atau tidak dilihat dari rendahnya ketergantungan daerah terhadap pusat. Untuk menunjukkan tingkat kemandirian keuangan/fiskal daerah ditunjukkan dari besarnya PAD. Seperti yang diketahui, sumber utama pendapatan daerah yaitu pajak daerah karena merupakan bentuk partisipasi masyarakat secara nyata dalam melaksanakan otonomi daerah. Kemandirian fiskal daerah mengindikasikan jumlah pasrtisipasi masyarakat untuk menggerakkan pertumbuhan ekonomi daerahnya. Semakin besar tingkat kemandirian keuangan daerah berarti semakin besar pasrtisipasi masyarakat untuk membayarkan pajaknya yang merupakan komponen PAD.

Peran pemerintah daerah dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah harus dilakukan dengan maksimal agar semua Wajib Pajak di Kabupaten Lamongan sadar dan taat akan kewajibannya untuk membayar pajak. Seringkali masyarakat mengabaikan kewajiban untuk membayarkan pajaknya sehingga penerimaan pajak daerah pun sulit mencapai target. Salah satu langkah untuk memaksimalkan penerimaan pajak adalah dengan melaksanakan sosialisasi terkait pajak daerah.

Sosialisasi terkait perpajakan daerah oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Lamongan. Kegiatan sosialisasi perpajakan dikatakan efektif atau tidak dilihat dari adanya kenaikan jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPTPD setiap tahunnya. Apabila dalam setiap tahun jumlah laporan SPTPD oleh Wajib Pajak terus mengalami peningkatan, dapat dikatakan bahwa kegiatan sosialisasi berjalan efektif. Namun, terlihat dalam grafik jika jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPTPD mengalami penurunan yang cukup banyak.

Gambar 1. 2.
Jumlah WP Lapor SPTPD di Kabupaten Lamongan Tahun 2017-2021



Sumber: Bapenda Lamongan, (2023)

Berdasarkan gambar 1.2., meskipun setiap tahunnya jumlah wajib pajak meningkat bukan penentu untuk jumlah wajib pajak yang melaporkan SPTPD meningkat pula. Cara untuk mendorong Wajib Pajak melaporkan SPTPD adalah dengan dilaksanakannya kegiatan sosialisasi perpajakan oleh pemda dengan teratur dan terus menerus agar Wajib

Pajak terstimulus untuk memenuhi kewajibannya akan pajak.

Berdasarkan pemaparan tersebut, maka penelitian ini berfokus pada bagaimana pengaruh efektivitas sosialisasi perpajakan dan efektivitas PAD terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Lamongan selama tahun 2017-2021.

Theory of planned behavior merupakan *Theory of planned behavior* menegaskan bahwa perilaku yang timbul atau akan dilakukan dari seseorang akan muncul karena dipengaruhi oleh niat (minat). Sesuai dengan Ajzen (2012) bahwa *Theory of planned behavior* mengindikasikan setiap orang dapat bertindak atas dasar niat atau intensi hanya jika memiliki kontrol terhadap perilaku tersebut.

Theory of fiscal federalism merupakan pengalihan tanggung jawab dari pemerintah pusat ke pemerintah daerah untuk mencapai pembangunan ekonomi. Adanya desentralisasi memaksimalkan kondisi ekonomi karena pemerintah daerah memiliki fungsi yang lebih optimal daripada pemerintah pusat dalam memberikan pelayanan publik yang disesuaikan dengan ciri dan kebutuhan daerah masing-masing. Dengan dilakukan kebijakan tersebut, pemerintah daerah dapat mengelola potensi daerahnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan memaksimalkan perolehan pendapatan asli daerah terutama dari sektor perpajakan.

Pertumbuhan ekonomi menurut Sulung et al. (2022) Pertumbuhan ekonomi ialah sistem aktivitas ekonomi yang meningkat seiring waktu, nantinya akan meningkatkan jumlah jasa dan produk yang dihasilkan. Jika kuantitas balas jasa aktual dalam konsumsi faktor-faktor produksi di tahun bersangkutan lebih banyak dari tahun sebelumnya, maka perekonomian dikatakan tumbuh. Meningkatnya pertumbuhan ekonomi di suatu daerah meningkatkan pendapatan perkapita masyarakat, sehingga meningkatkan produktivitas dan konsumsi masyarakat. Selanjutnya, semakin tinggi tingkat pengeluaran dalam penggunaan

barang dan jasa, maka semakin tingginya kemampuan masyarakat dalam memenuhi retribusi yang dikenakan oleh pemerintah daerah (Wiraswasta et al., 2019).

Pendapatan Asli Daerah sesuai dengan UU No.33 Tahun 2004 Pasal 1 Ayat18 menerangkan PAD (Pendapatan Asli Daerah) merupakan pendapatan yang diterima dan dipungut oleh daerah berlandaskan perda yang sesuai dengan perundang-undangan.

Menurut Permatasari & Trisnainingsih (2022) PAD ialah pendapatan yang ditangani daerah sebagai dasar pelaksanaan sistem otonomi daerah. PAD yang memiliki peran dominan dalam pendapatan daerah adalah indikasi bahwa tercapainya usaha dan tingkat kemampuan pemerintah dalam hal pembangunan daerahnya.

Sosialisasi perpajakan menurut Inayah et al. (2021) sosialisasi perpajakan merupakan langkah Dirjen Pajak dalam memberikan, informasi, pemahaman, serta pengetahuan kepada masyarakat, utamanya terkait kewajiban Wajib Pajak berdasarkan UU perpajakan. Meningkatkan pengetahuan masyarakat dan wajib pajak serta membayar pajak untuk melestarikan kehidupan negara dapat dilakukan dengan mengadakan sosialisasi perpajakan yang dipimpin oleh Dirjen Pajak. Upaya sosialisasi pajak daerah berupaya mengedukasi seluruh lapisan penduduk tentang pentingnya melakukan kewajiban dalam pembayaran pajak daerah, yang nantinya digunakan untuk pengelolaan pemerintah daerah (Astari, 2022).

Efektivitas menurut Chandra et al. (2020) menjelaskan bahwa efektivitas ialah suatu korelasi antara hasil yang diperoleh serta tujuan atau tolak ukur hasil yang diperoleh, proses dan kebijakan dari organisasi. Semakin banyak kontribusi keluaran yang diberikan terhadap target sasaran/tujuan, maka proses kerja suatu unit organisasi dapat dikatakan semakin efisien.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini termasuk jenis penelitian kuantitatif. Data yang didapat ialah data tentang pertumbuhan ekonomi,

yaitu data PDRB ADHK menurut pengeluaran, data PAD, data jumlah Wajib Pajak melaporkan SPTPD, dan data jumlah Wajib Pajak yang terdaftar di tahun 2017-2021. Dalam mengumpulkan data, teknik yang digunakan ialah studi dokumentasi. Setelah data berhasil diperoleh, selanjutnya data diolah menggunakan alat olah data, yaitu WarpPLS 7.0. Untuk membuktikan apakah hasil penelitian ini sudah benar, maka dilakukan pengecekan keabsahan data melalui analisis *outer* model, analisis inner model, dan uji hipotesis.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Analisis *Outer Model*

Uji *Convergent Validity*

Tabel 4. 1.

Uji *Convergent Validity*

Variabel	Loading Factor	P-Value	Ket.
X1 (ESP)	1.000	<0.001	Terpenuhi
X2 (EPAD)	1.000	<0.001	Terpenuhi
Y (PT)	1.000	<0.001	Terpenuhi

Sumber: WarpPls 7.0, (2023)

Nilai AVE

Tabel 4. 2.

Nilai AVE

Variabel	Nilai AVE
X1 (ESP)	1.000
X2 (EPAD)	1.000
Y (PT)	1.000

Sumber: WarpPls 7.0, (2023)

Uji *Discriminant Validity*

Tabel 4. 3.

Uji *Discriminant Validity*

	ESP	EPAD	PT	SE	P-Value
X1	1.000	0.000	0.000	0.133	<0.001
X2	0.000	1.000	0.000	0.133	<0.001
Y	0.000	0.000	1.000	0.133	<0.001

Sumber: WarpPls 7.0, (2023)

Nilai Akar AVE

Tabel 4. 4.

Nilai Akar AVE

Variabel	Akar AVE		
	X1	X2	Y
X1 (ESP)	1.000	0.994	0.403
X2 (EPAD)	0.994	1.000	0.495
Y (PT)	0.403	0.495	1.000

Sumber: WarpPls 7.0, (2023)

Analisis *Inner Model*

R-Square

Tabel 4. 5.

Nilai R-Square

	Y (PT)
R-Square	0.420

Sumber: WarpPls 7.0, (2023)

Q-Square

Tabel 4. 6.

Nilai Q-Square

	Y (PT)
Q-Square	0.773

Sumber: WarpPls 7.0, (2023)

Uji Fit Model

Tabel 4. 7.

Uji Fit Model

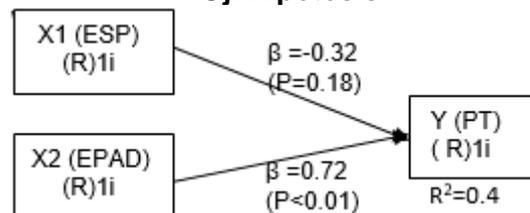
No.	Fit Model	Hasil Uji	Ket.
1.	APC	0.518 (P=0.024)	P<0.05 Memenuhi
2.	ARS	0.420 (P=0.048)	P<0.05 Memenuhi
3.	AVIF	1.831	Diterima
4.	GoF	0.648	Large
5.	SSR	1.000	Diterima
6.	NLBCDR	1.000	Diterima

Sumber: WarpPls 7.0, (2023)

Uji Hipotesis

Tabel 4. 8.

Uji Hipotesis



Sumber: WarpPls 7.0, (2023)

Tabel 4. 9.
Hasil Uji Hipotesis

	Path Coefficient	P-Values	Result
X1 → Y	-0.32	0.18	Ditolak
X2 → Y	0.72	<0.01	Diterima

Sumber: Data Diolah, (2023)

H₁: Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan gambar terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis 1 menghasilkan nilai koefisien jalur yaitu -0.32 dan nilai *p-value* sebesar $P=0.18$. Diketahui kriteria nilai *p-value* agar hipotesis diterima adalah $P<0.05$, sehingga hasil pengujian hipotesis 1 (H_1) adalah efektivitas sosialisasi perpajakan (X_1) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) ditolak yang artinya efektivitas sosialisasi perpajakan tidak memiliki pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil uji hipotesis 1 memperlihatkan efektivitas sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Artinya semakin tinggi atau semakin rendah efektivitas sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian selaras dengan temuan Siahaan & Halimatusyadiah (2018) bahwa sosialisasi tidak memiliki pengaruh pada kepatuhan WPOP. Namun, hasil kajian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Zahra et al. (2022) dimana sosialisasi perpajakan memiliki pengaruh terhadap penerimaan pendapatan pajak daerah.

Sosialisasi perpajakan merupakan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pemda yang bermaksud memberikan pengetahuan dan stimulus agar Wajib Pajak taat untuk melapor dan membayarkan kewajiban pajaknya. Selaras dengan *theory of planned behavior* dimana individu akan berperilaku didasarkan pada munculnya niat dan motivasi. Maka, untuk Kegiatan sosialisasi perpajakan merupakan aspek penentu wajib pajak dalam patuh membayarkan pajaknya. Namun berdasarkan hasil dari penelitian ini, tidak berpengaruhnya sosialisasi perpajakan terhadap pertumbuhan ekonomi sebab Wajib Pajak tidak mengindahkan dan merealisasikan informasi penyuluhan perpajakan. Hal tersebut terlihat pada jumlah Wajib Pajak yang melaporkan SPTPD kian menurun. Wajib Pajak yang tidak melapor dan membayarkan pajaknya akan

menghambat peningkatan penerimaan pendapatan daerah, sehingga Pemda kesulitan untuk membelanjai pembangunan daerah dan akan mengandalkan dari pemerintah pusat. Hal tersebut akan membawa dampak pada melambatnya pertumbuhan ekonomi.

H₂: Efektivitas Pendapatan Asli Daerah Berpengaruh Terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Berdasarkan gambar terlihat bahwa hasil pengujian hipotesis 2 menghasilkan nilai koefisien jalur yaitu 0.72 dan nilai *p-value* sebesar $P<0.01$. Diketahui kriteria nilai *p-value* agar hipotesis diterima adalah $P<0.05$, sehingga hasil pengujian hipotesis 2 (H_2) adalah efektivitas Pendapatan Asli Daerah (X_2) terhadap pertumbuhan ekonomi (Y) diterima yang artinya efektivitas PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil uji hipotesis 2 memperlihatkan efektivitas PAD berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Kabupaten Lamongan. Artinya semakin tinggi atau semakin rendah efektivitas PAD akan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Kajian ini selaras dengan temuan Suebah & Gunawan (2022) bahwa PAD dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

PAD yaitu pendapatan yang diterima daerah dipungut berdasar pada undang-undang. Suatu daerah dikatakan mengalami kemajuan ketika PAD tinggi, karena semakin tinggi tingkat PAD maka tingkat ketergantungan Pemda kepada pemerintah pusat semakin turun. Akibatnya, penerimaan PAD dapat dipakai untuk membelanjai pembangunan daerah dan mensejahterakan masyarakat. Sesuai dengan *Theory of Fiscal Federalism* bahwa munculnya desentralisasi fiskal diharapkan dapat mencapai pertumbuhan ekonomi. Adanya kebijakan desentralisasi fiskal dapat mengelola potensi daerahnya untuk meningkatkan pertumbuhan ekonominya dengan memaksimalkan perolehan PAD.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan diperoleh kesimpulan, yaitu:

1. Efektivitas sosialisasi perpajakan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Kabupaten Lamongan.
2. Efektivitas Pendapatan Asli Daerah berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Kabupaten Lamongan.

Saran

Berdasarkan kajian diatas, beberapa saran yang diharapkan akan berguna untuk bahan pertimbangan dalam penelitian selanjutnya, antara lain:

1. Bagi Pemerintah Kabupaten Lamongan diharapkan untuk lebih menggali potensi daerahnya utamanya dalam sektor pendapatan untuk memaksimalkan penerimaan PAD sehingga dapat mendukung peningkatan pertumbuhan ekonomi. Pemerintah Daerah harus tetap konsisten untuk memberikan sosialisasi kepada masyarakat agar memperoleh output sesuai yang diharapkan, yaitu masyarakat sadar akan pentingnya membayar pajak dan akan meningkatkan penerimaan pajak daerah.
2. Bagi masyarakat diharapkan dapat bekerja sama guna meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Patuh terhadap aturan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah terkait hal perpajakan dan memiliki kesadaran akan pentingnya membayar pajak untuk menunjang tingkat Pendapatan Asli Daerah yang baik.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan untuk menambah variabel berbeda yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Pemerintah Kabupaten Lamongan.

DAFTAR PUSTAKA

Ajzen, I. (2012). The Theory Of Planned Behavior. In Handbook Of Theories Of Social Psychology (Pp. 438–459). New York: Lawrence Erlbaum Associates.

<https://doi.org/10.4135/9781446249215.N22>.

- Astari, W. (2022). Sosialisasi Pajak Daerah Kabupaten Dompu Tahun 2022. setda.dompukab.go.id Retrieved on January 25, 2023. setda.dompukab.go.id/Sosialisasi-Pajak-Daerah-Kabupaten-Dompu-Tahun-2022.
- Chandra, C. A., Sabijono, H., & Runtu, T. (2020). Efektivitas Dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Pbb-P2) Terhadap Penerimaan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Di Kota Gorontalo Tahun 2016-2018. *Goin Concern: Jurnal Riset Akuntansi*, 15(3), 290–298.
- Bappelitbangda. (2022). Pertumbuhan Ekonomi Lamongan. Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, Dan Pengembangan Daerah. lamongankab.go.id Retrieved on January 25, 2023. lamongankab.go.id/beranda/bappelitbangda/post/6316.
- Inayah, N. L., Hidayati, K., & Brillianty A, N. A. (2021). Analisis Efektivitas Sosialisasi Perpajakan Dan Pengetahuan Perpajakan Dalam Rangka Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak Pada KPP Madya Sidoarjo. *Ekobis: Jurnal Ekonomi & Bisnis*, 2(1), 1–11. <https://doi.org/10.46821/ekobis.v2i1.207>.
- Nurcholidah, L., Susanti, I., & Kristiawati, I. (2018). Pengaruh Realisasi Growth Rasio Pad Terhadap Pertumbuhan Perekonomian Masyarakat Kabupaten Lamongan Periode Tahun 2012-2016. *Jurnal Ekbis*, 19(1), 1011. <https://doi.org/10.30736/ekbis.v19i1.135>.
- Permatasari, D. A., & Trisnaningsih, S. (2022). Pengaruh Kemandirian, Efektifitas Pendapatan Asli Daerah Dan Belanja Daerah Terhadap Kinerja Keuangan Daerah. 22(3), 1573–1582.

- <https://doi.org/10.33087/jiubj.v22i3.2581>.
- Rendy, M. (2022). Analisis Peningkatan Pajak Daerah Tahun 2021 Di Era Normal Dan New Normal Terdampak Pandemi Covid-19. *Jurnal Pemikiran Ekonomi Syariah STIS Darul Ulum Lampung Timur*, 02(01), 117–136.
- Suebah, & Gunawan, I. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Kota Serang. *Jurnal Manajemen Dan Retail*, 2(1), 54–77.
- Sulung, G. J. P., Walawengko, E. N., & Masloman, I. (2022). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Dan Dana Transfer Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Sulawesi Utara. *Jurnal Berkala Ilmiah Efisiensi*, 22(5), 109–120.
- Walintukan, V., Kindangen, P., & Walawengko, E. (2019). Pengaruh Desentralisasi, Pertumbuhan PAD Dan Kemandirian Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Di Provinsi Sulut Tahun 2009-2017. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 20(3), 48–59.
- Watulingas, C. A. S., Kindangen, P., & Engka, D. S. M. (2018). Pengaruh Pendapatan Asli Daerah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Di Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Pembangunan Ekonomi Dan Keuangan Daerah*, 19(3), 104–117.
- Wiraswasta, F., Pudjiharjo, M., & Adis, P. M. (2019). Pengaruh Dana Perimbangan Dan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal Di Kota Dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014). *Jurnal Bisnis Dan Manajemen*, 5(2), 170–180.
- Zahra, H. L., Pramukti, R., & Yulaeli, T. (2022). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Efektivitas Pemungutan Dan Kontribusi, Serta Tunggakan Pajak Bumi Dan Bangunan Terhadap Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah. *Journal Of Comprehensive Science*, 1(5), 1100–1104.
- Kuntoro, T. 2006. *Pengembangan Kurikulum Pelatihan Magang di STM Nasional Semarang: Suatu Studi Berdasarkan Dunia Usaha*. Tesis tidak diterbitkan. Semarang: PPS UNNES
- Pitunov, B. 13 Desember 2007. Sekolah Unggulan Ataukah Sekolah Pengunggulan ? *Majalah Pos*, hlm. 4 & 11
- Waseso, M.G. 2001. *Isi dan Format Jurnal Ilmiah*. Makalah disajikan dalam Seminar Lokakarya Penulisan artikel dan Pengelolaan jurnal Ilmiah, Universitas Lambungmangkurat, 9-11 Agustus